

Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Pengaruhnya terhadap Belanja Daerah di Provinsi Jambi

M. Zahari MS

Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari

Correspondence email: m.zaharims@gmail.com

Abstract. *Local Own Revenue (PAD) is an important source for the formation of regional finances to be allocated for regional expenditure. This study aims to analyze the potential sources of regional own-source revenues and their effects on capital expenditure in Jambi Province. This research was conducted in Jambi Province. The data used in the form of secondary data in the period 2010 – 2018. The research method uses descriptive and quantitative methods. The analytical tool used in this study is a simple linear regression analysis and hypothesis testing with t test. The results showed that the potential source of PAD came from local taxes, which provided the largest contribution in realizing PAD, while the smallest contribution was regional retribution. Empirically, the original regional income has a significant influence on regional expenditure, meaning that the higher the PAD income, the higher the regional expenditure for regional development activities and public services.*

Keywords: *Regional Finance, Regional Original Revenue, Regional Expenditure.*

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan otonomi daerah tersebut tentunya bersekuensi terhadap penyediaan dana terutama yang bersumber dari pengelolaan potensi yang ada pada daerah sendiri. Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 dinyatakan, sumber-sumber pendanaan pelaksanaan pemerintah daerah, terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pemerintahan daerah dalam mengalokasikan dana untuk kegiatan pembangunan daerah dan pelayanan publik pada setiap tahunnya dicantumkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pada APBD akan tergambar pos penerimaan daerah dan porsi belanja daerah yang dibutuhkan daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik yang menunjang kegiatan produktif. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah dalam penggunaan dana tersebut harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Belanja daerah merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan daerah (Wati dan Fajar, 2017). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Pasal 26 ayat (1), ditegaskan bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan, dan ayat (2) dinyatakan: belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. (<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=460>).

Pada umumnya belanja daerah memiliki kecenderungan untuk selalu naik (Wati dan Fajar, 2017). Kebutuhan belanja daerah yang terus meningkat ini, tentunya harus ditopang dengan ada peningkatan penerimaan daerah terutama yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD). Untuk itu, perlu ada dorongan dari Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kemampuannya dalam mengumpulkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan maksud agar subsidi dari pemerintah pusat dapat dikurangi dan mengurangi beban APBN (Suparmoko, 2002). PAD yang merupakan sumber penerimaan dari daerah sendiri perlu ditingkatkan agar dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan daerah yang semakin meningkat (Orbaningsih, 2010).

Provinsi Jambi, sebagaimana provinsi lainnya yang ada di Indonesia dalam memenuhi kebutuhan akan pelayanan publik dan pembangunan daerah diperlukan dana yang tidak sedikit jumlahnya, baik yang berasal dari daerah sendiri atau bantuan dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan. Selama tahun 2010 – 2018, APBD Provinsi Jambi menunjukkan trend peningkatan dari tahun 2010 sejumlah Rp. 1,84 triliun dan pada tahun 2018 sejumlah Rp. 4,51 triliun atau mengalami peningkatan rata-rata pertahun sebesar 13,09%. Realisasi PAD menunjukkan peningkatan, yaitu dari sebesar Rp.686 miliar pada tahun 2010 dan menjadi sebesar Rp. 1,49 triliun pada tahun 2018 atau tumbuh rata-rata sebesar 11,48 persen pertahun. Peningkatan PAD ini belum sepenuhnya dapat diandalkan dalam menopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi, karena kontribusi PAD terhadap APBD relatif masih rendah bahkan cenderung menurun. Gambaran kontribusi PAD dan dana perimbangan terhadap APBD di Provinsi Jambi tahun 2010 – 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1

Kontribusi PAD dan Dana Perimbangan terhadap APBD Provinsi Jambi Tahun 2010-2018

Tahun	PAD (Rp.Miliar)	Dana Perimbangan (Rp.Miliar)	APBD (Rp.Miliar)	Rasio (%) AD/APBD	Rasio (%) DP/APBD
2010	686	932	1.841	37,29	50,63
2011	984	1.075	2.432	40,47	44,21
2012	995	1.332	3.287	30,29	40,54
2013	1.063	1.489	3.577	29,74	41,65
2014	1.281	1.514	3.679	34,82	41,16
2015	1.241	1.419	3.604	34,44	39,37
2016	1.273	1.549	3.742	35,26	41,35
2017	1.580	2.766	4.583	34,48	59,41
2018	1.494	2.703	4.515	33,10	59,88

Sumber: BPS Provinsi Jambi, Statistik Keuangan Daerah, 2010 – 2018

Pada tahun 2010, PAD memberikan kontribusi sebesar 37,29 persen, tahun 2011 meningkat menjadi 40,47 persen, dan tahun 2018 PAD hanya mampu memberikan kontribusi terhadap APBD Provinsi Jambi sebesar 33,10 persen. Kondisi ini tentunya menyebabkan masih tingginya ketergantungan dana dari pemerintah pusat, karena rasio dana perimbangan terhadap APBD Provinsi Jambi hingga tahun 2018 mencapai 59,88 persen jauh melebihi rasio PAD yang hanya sebesar 33,10 persen. Kebutuhan belanja daerah yang terus meningkat ini, sedangkan penerimaan PAD kontribusinya cenderung menurun, sementara rasio dana perimbangan meningkat tajam. Kondisi ini menggambarkan masih tingginya ketergantungan Provinsi Jambi akan dana yang berasal pemerintah pusat. Permasalahan yang sering dirasakan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan sumber dana pada umumnya adalah berkaitan dengan penggalan sumber-sumber PAD yang belum optimal terutama yang berasal pajak daerah dan retribusi daerah. Berdasarkan fenomena diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah : (a) Sumber PAD yang mana paling potensial dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Provinsi Jambi. (b) Bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah di Provinsi Jambi. Tujuan Penelitian adalah: (a) menganalisis sumber pendapatan asli daerah yang potensial di Provinsi Jambi. (b) menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah Provinsi Jambi.

METODE

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data kuantitatif berupa penerimaan daerah, pendapatan asli daerah dan belanja daerah, yang dikumpulkan dalam kurun waktu (*time series*) tahun 2010 – 2018. Data diperoleh dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Provinsi Jambi dan Badan Pusat Statistik (BPS) Jambi. Metode analisis data yang digunakan dengan pendekatan analisis deskriptif dan analisis kuantitatif dengan model regresi linier sederhana dengan bantuan program Eviews. Persamaan Regresi linier sederhana dalam penelitian diformulasikan sebagai berikut:

$$BD = \beta_0 + \beta_1 PAD + e$$

Dimana: BD = Belanja Daerah; β_0 = Konstanta; β_1 = Koefisien regresi; PAD = Pendapatan Asli Daerah; e = Error

Untuk dapat mengetahui baik atau tidaknya model regresi yang terestimasi dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi (R^2). Koefisien determinasi ini mencerminkan seberapa besar variasi dari variabel terikat (dependen) dapat diterangkan oleh variabel bebas (independen). Pengujian hipotesis digunakan dengan uji t, yaitu untuk menguji tingkat signifikansi dari pengaruh PAD terhadap belanja daerah. Uji t ini dilakukan dengan cara membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel pada derajat kebebasan atau *Degree of freedom* (df) yaitu n-k-1 (Sugiyono, 2011), dengan tingkat keyakinan 95 persen atau taraf signifikan sebesar $\alpha = 5\%$ (0,05). Kriterianya sebagai berikut:

- a. $t_{hitung} \geq t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan menerima H_a , artinya vartabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- b. $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan menolak H_a , artinya vartabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

HASIL

Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting dalam pembentukan keuangan daerah. Meningkatnya kemampuan keuangan daerah akan meningkatkan pula alokasi belanja daerah untuk kegiatan pembangunan daerah dan pelayanan publik. Untuk itu, pemerintah daerah akan terus berusaha untuk menggali dan mengelola sumber-sumber penerimaan daerah di berbagai sektor, diantaranya meningkatkan PAD melalui pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang Sah. Gambaran realisasi mengenai kemampuan keuangan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah di Provinsi Jambi dapat disimak pada tabel berikut ini:

Tabel 2
Realisasi PAD Provinsi Jambi Tahun 2010-2018

Jenis Penerimaan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-rata
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	686629	984232	995822	1063922	1281239	1241237	1273893	1580533	1494530	1,168,937.33
Pertumbuhan (%)	-	43.34	1.18	6.84	20.43	(3.12)	2.63	24.07	(5.44)	11.24
Pajak Daerah (PD)	602355	838851	808258	841884	1010561	1010319	1062315	1316162	1272728	963,070.78
Pertumbuhan (%)	-	39.26	(3.65)	4.16	20.04	(0.02)	5.15	23.90	(3.30)	10.69
Rasio PD/PAD (%)	87.73	85.23	81.16	79.13	78.87	81.40	83.39	83.27	85.16	82.20
Retribusi Daerah (RD)	43609	10195	12053	15364	14587	19337	20610	19865	21199	19,432.67
Pertumbuhan (%)	-	(76.62)	18.22	27.47	(5.06)	32.56	6.58	(3.61)	6.72	0.78
Rasio RD/PAD (%)	6.35	1.04	1.21	1.44	1.14	1.56	1.62	1.26	1.42	1.33
Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah (HPKD)	12443	21703	29984	26879	32219	33956	33503	29054	43059	28,475.22
Pertumbuhan (%)	-	74.42	38.16	(10.36)	19.87	5.39	(1.33)	(13.28)	48.20	20.13
Rasio HPKD/PAD (%)	1.81	2.21	3.01	2.53	2.51	2.74	2.63	1.84	2.88	2.54
Lain-lain PAD yang Sah (LLP)	28220	113482	145525	179795	223872	177625	157465	215452	157544	157,958.22
Pertumbuhan (%)	-	302.13	28.24	23.55	24.52	(20.66)	(11.35)	36.83	(26.88)	44.55
Rasio LLP/PAD (%)	4.11	11.53	14.61	16.90	17.47	14.31	12.36	13.63	10.54	13.92

Sumber : Statistik Keuangan Daerah, BPS Provinsi Jambi 2010-2018 (diolah)

Pada Tabel 2, perkembangan realisasi pendapatan asli daerah Provinsi Jambi menunjukkan fluktuatif. Selama periode 2010 – 2018 penerimaan PAD Provinsi Jambi terjadi peningkatan rata-rata sebesar 11,24 persen pertahun. Realisasi pendapatan asli daerah Provinsi Jambi pada tahun 2018 tercatat sebesar 1,49 triliun rupiah atau meningkat sebesar 117,66 persen dibandingkan dengan tahun 2010 yang tercatat sebesar 686,62 miliar. Sumber PAD Provinsi Jambi pada tahun 2018 didominasi oleh Penerimaan Pajak Daerah yaitu sebesar 1,27 triliun rupiah (85,16 persen), Lain-lain PAD yang Sah sebesar 157,54 miliar rupiah (10,54 persen), dan sisanya berasal dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar 43,05 miliar rupiah (2,88 persen). Sementara, Retribusi Daerah yang merupakan bentuk penerimaan atas penggunaan fasilitas/pelayanan yang diberikan Pemerintah Provinsi Jambi kepada masyarakat memberikan sumbangan terkecil terhadap PAD yaitu sebesar 21,19 miliar rupiah (1,42 persen). Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang sangat penting bagi daerah dalam mengukur kemandirian keuangan daerah, karena pendapatan ini seluruhnya digali dan berasal dari daerah sendiri. Oleh karena itu, daerah mempunyai kewenangan penuh untuk memanfaatkan PAD sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah.

Realisasi Belanja Daerah

Jumlah keseluruhan dana APBD, baik yang berasal dari PAD maupun dana perimbangan menjadi sumber belanja daerah dalam rangka melakukan pembangunan daerah guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan suatu daerah dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat sangat tergantung pada kebijakan dari masing-masing pemerintah daerah. Kebijakan tersebut tercermin pada alokasi belanja daerah di APBD, yang terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung serta pembiayaan.

Tabel 3
Realisasi Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010-2018

Jenis Pengeluaran	Realisasi Belanja Daerah (Rp. Juta)									Rata-rata
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Belanja Tidak Langsung	672277	760339	1245497	1271926	1483116	1762391	1649327	2246421	2439437	1,503,415
Pert (%)	-	13.10	63.81	2.12	16.60	18.83	(6.42)	36.20	8.59	19.11
Rasio BTL/BD	36.51	31.26	37.89	35.56	40.31	48.90	48.77	49.01	54.03	42.47
Belanja Langsung	815863	989902	1286101	1738815	1721517	1663175	1645157	1886521	2075707	1,535,862
Pert (%)	-	21.33	29.92	35.20	(0.99)	(3.39)	(1.08)	14.67	10.03	13.21
Rasio BL/BD	44.31	40.70	39.13	48.61	46.79	46.14	48.65	41.16	45.97	44.61
Belanja Pegawai	53961	68132	84158	98334	90005	110945	122473	175425	188785	110,246
Pert (%)	-	26.26	23.52	16.84	(8.47)	23.27	10.39	43.24	7.62	17.83
Rasio BP/ BD	2.93	2.80	2.56	2.75	2.45	3.08	3.62	3.83	4.18	3.13
Belanja Barang dan Jasa	296041	403019	523197	702496	813453	760928	577145	815447	892933	642,740
Pert (%)	-	36.14	29.82	34.27	15.79	(6.46)	(24.15)	41.29	9.50	17.03
Rasio BBJ/BD	16.08	16.57	15.92	19.64	22.11	21.11	17.07	17.79	19.78	18.75
Belanja Modal	465860	518750	678747	937986	818059	791302	945539	895648	993989	782,876
Pert (%)	-	11.35	30.84	38.19	(12.79)	(3.27)	19.49	(5.28)	10.98	11.19
Rasio BM/BD	25.30	21.33	20.65	26.22	22.23	21.95	27.96	19.54	22.01	22.74
Pembiayaan Daerah	353260	681825	755497	566331	474526	178679	87399	450544	0	394,229
Pert (%)	-	93.01	10.81	(25.04)	(16.21)	(62.35)	(51.09)	415.50	(100.00)	33.08
Total Belanja	1841400	2432067	3287095	3577072	3679159	3604245	3381884	4583486	4515144	3,433,506
Pert (%)	-	32.08	35.16	8.82	2.85	(2.04)	(6.17)	35.53	(1.49)	13.09

Sumber : BPS, Statistik Keuangan Daerah, 2010 – 2018, diolah.

Berdasarkan Tabel 3 diketahui total belanja daerah di Provinsi Jambi pada tahun 2010 sebesar Rp.1,84 triliun dan meningkat tajam pada tahun 2016 hingga dua kali lipat yaitu mencapai sebesar Rp. 4,51 triliun. Secara rata-rata

total belanja daerah di Provinsi Jambi dari tahun 2010 hingga tahun 2018 mengalami perkembangan yang cukup signifikan yaitu meningkat rata-rata sebesar 13,09 persen pertahun. Belanja langsung pada tahun 2010 sebesar Rp. 815,86 miliar dan tahun 2018 meningkat menjadi Rp. 2,07 triliun. Demikian pula dengan belanja tidak langsung mengalami peningkatan dari sebesar Rp. 672,27 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp. 2,43 triliun pada tahun 2018. Dilihat dari prosentase peningkatan, belanja tidak langsung lebih tinggi prosentasenya dibandingkan dengan belanja langsung dan pembiayaan daerah. Belanja tidak langsung mengalami peningkatan rata-rata sebesar 19,11 persen pertahun dan belanja langsung meningkat rata-rata sebesar 13,21 persen pertahun, sedangkan pembiayaan daerah mengalami fluktuasi dan rata-rata sebesar 33,08 persen pertahun. Pada komponen belanja langsung, peningkatan tertinggi terjadi pada belanja pegawai yaitu rata-rata sebesar 17,83 persen pertahun dan belanja barang dan jasa rata-rata sebesar 17,03 persen pertahun, sedangkan belanja modal terendah peningkatannya yaitu rata-rata sebesar 11,19 persen pertahun.

Alokasi belanja daerah terbesar terserap untuk belanja langsung yaitu mencapai rata-rata sebesar 44,61 persen pertahun, sedang belanja tidak langsung sebesar 42,47 persen pertahun. Dilihat dari belanja langsung, terbesar dialokasikan untuk belanja modal yaitu rata-rata sebesar 22,74 persen pertahun dan yang terendah untuk keperluan belanja pegawai sebesar 3,13 persen pertahun. Perbedaan besarnya alokasi masing-masing belanja daerah ini tidak terlepas dari adanya perbedaan potensi, kondisi dan kebijakan prioritas pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Semakin banyak potensi sumber-sumber penerimaan daerah sendiri yang dapat digali akan semakin besar ketersediaan alokasi belanja daerah yang dapat dimanfaatkan untuk penyediaan fasilitas publik dan kegiatan pembangunan daerah. Peningkatan belanja daerah ini ditopang dengan kemampuan keuangan daerah yang cukup sehingga berbagai kegiatan pembangunan daerah untuk penyediaan fasilitas publik seperti fasilitas kesehatan dan pendidikan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat diperbaiki dan ditingkatkan.

Pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah

Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah di Provinsi Jambi, maka akan dianalisis dengan menggunakan alat analisis regresi linier sederhana, determinasi, dan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t (parsial). Hasil estimasi dengan bantuan program Eviews terlihat pada tabel 4 berikut ini:

Tabel 4
Hasil Estimasi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-117.4807	456.8474	-0.257155	0.8045
PAD	3.037790	0.381601	7.960640	0.0001
R-squared	0.900528	Mean dependent var		3433.506
Adjusted R-squared	0.886318	S.D. dependent var		877.8016
S.E. of regression	295.9662	Akaike info criterion		14.41150
Sum squared resid	613171.8	Schwarz criterion		14.45533
Log likelihood	-62.85174	Hannan-Quinn criter.		14.31692
F-statistic	63.37179	Durbin-Watson stat		1.849364
Prob(F-statistic)	0.000094			

Sumber: data olahan

Persamaan Regresi Linier Sederhana

Berdasarkan hasil estimasi dapat diketahui nilai koefisien regresi sebagai berikut:

$$BD = \beta_0 + \beta_1 PAD + e$$

$$BD = -117,4807 + 3,0378 PAD + e$$

Persamaan hasil regresi ini dapat maknai:

a. Konstanta (BD) = -117.481.

Artinya bahwa pada saat variabel PAD dalam keadaan konstan, maka belanja daerah (BD) di Provinsi Jambi menurun sebesar 117,4807, dengan asumsi faktor-faktor lain dianggap konstan atau nol.

b. Pendapatan Asli Daerah (PAD) = 3,0378.

Artinya apabila terjadi kenaikan pada PAD dalam satu satuan, maka dapat meningkatkan belanja daerah sebesar 3,0378, dimana faktor lainnya dalam keadaan konstan atau nol.

Dilihat dari koefisien determinasi (*R Square*) adalah sebesar 0,9005. Angka ini menunjukkan variabel PAD memiliki kemampuan menjelaskan variabel belanja daerah sebesar 90,05%, sedangkan sisanya sebesar 9,95% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini. Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji t yaitu membandingkan uji t hitung dengan t tabel. Hasil estimasi menunjukkan nilai t hitung sebesar 7,960640, dan nilai t tabel pada df = 7 dengan tingkat signifikan 95 % atau $\alpha = 5\%$ (0,05) maka diperoleh

t tabel sebesar 2,36462, maka t hitung $>$ t tabel atau signifikansi $0,0001 < 0,05$ yang menunjukkan hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternative (H_a) diterima, artinya Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah di Provinsi Jambi.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian ini telah dapat menjawab hipotesis yang diajukan yaitu “Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah di Provinsi Jambi”. Kenyataan ini mengindikasikan PAD sangat berperan penting dalam meningkatkan penyediaan dana untuk anggaran belanja daerah di Provinsi Jambi. Temuan ini menjelaskan bahwa kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan daerah memiliki pengaruh yang menentukan bagi daerah untuk mendukung atau membiayai seluruh pengeluaran yang berhubungan dengan alokasi belanja daerah yang dicantumkan dalam APBD. Dengan kata lain sebagian besar pengeluaran atas belanja daerah ditentukan oleh penerimaan yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD). Temuan ini juga dapat diartikan jika semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan asli daerah dari potensi yang ada di daerah, maka akan semakin besar kemampuan daerah tersebut dalam mendukung belanja daerahnya, namun sebaliknya jika semakin rendah kemampuan daerah dalam menghasilkan penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, maka juga akan menurunkan kemampuan daerah tersebut mengalokasikan anggaran belanja daerah yang telah direncanakan untuk kegiatan pembangunan daerah dan pelayanan publik. Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Wati dan Fajar (2017) yang menyimpulkan Pendapatan asli daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah. Penelitian Dermawan (2017) menemukan, Pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Hasil penelitian Rahmawati, et al. (2015) menemukan, Pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Demikian pula hasil penelitian Rahim (2008) menjelaskan Secara umum, semakin tinggi kontribusi PAD dan semakin tinggi kemampuan daerah untuk membiayai kemampuannya sendiri akan menunjukkan kinerja keuangan daerah yang positif. Peningkatan PAD ini dapat juga mengurangi ketergantungan sumber dana dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan. Apabila kemampuan PAD dalam rangka menunjang kemampuan keuangan daerah masih relatif rendah, maka akan menyebabkan ketergantungan daerah terhadap dana pemerintah pusat masih cukup tinggi, akibatnya kemandirian daerah sebagai implemmentasi dari asas desentralisasi dalam pelaksanaan otonomi daerah akan sulit dicapai sepenuhnya.

SIMPULAN

1. Pajak daerah merupakan sumber penerimaan yang potensial dalam merealisasi PAD, sedang retribusi daerah relatif sangat tidak potensial dalam meningkatkan penerimaan PAD di Provinsi Jambi.
2. Di Provinsi Jambi, Pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, artinya semakin tinggi penerimaan PAD akan semakin meningkatkan belanja daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Dermawan, Wildan Dwi. 2017. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat)*. Jurnal Ilmiah EDUKASI Volume. 5 Nomor 2, November 2017
- Kementerian Keuangan Dirjend Perimbangan Keuangan. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=460>.
- Orbaningsih, Dwi. 2010. *Penggalian Potensi Pendapatan Asli Daerah di Kota Malang*. Jurnal akuntansi indonesia vol. 6, no. 1, februari 2010, 1—12
- Rahim, Syamsuri. 2008. *Analisis Kemampuan Pendapatan Asli Daerah Dalam Membiayai Belanja Daerah*. Jurnal Ichsan Gorontalo. Vol. 3 No. 2, Mei – Juli 2008.
- Rahmawati, Luluk Atika dan Bambang Suryono. (2015). *Flypaper Effect Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Vol.4, No.9: 1-20.
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Suparmoko, 2002. *Ekonomi Publik: Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Edisi Pertama, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126.
- Wati, Masayu Rahma dan Catur Martian Fajar. 2017. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung*. Jurnal Kajian Akuntansi, Vol 1, (1), 2017, 63-76